

Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Desa Turaloa Timur

Yulita Klaudia Sepe, Stefanus H. Gusti Ma
e-mail: ephentino@gmail.com

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Flores
Program Studi Manajemen, Universitas Flores

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Desa Turaloa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan statistik deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data APBDes Turaloa Timur, Kabupaten Ngada pada tahun 2024 dan 2025 yang diperoleh dari Desa Turaloa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PADes berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan desa, yang menandakan bahwa peningkatan PADes dapat mengurangi ketergantungan desa pada bantuan pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal desa. Sebaliknya, belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan desa tetapi kearah negative, dimana belanja modal yang besar tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja keuangan yang mungkin disebabkan oleh alokasi dana yang kurang tepat sasaran, ketidakefisien dalam perencanaan dan pengelolaannya serta tidak memberikan efek berganda yang signifikan bagi perekonomian desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dengan mengoptimalkan PADes dan memprioritaskan perencanaan yang matang dalam mengalokasikan belanja modal untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci: belanja modal, kemandirian fiskal, kinerja keuangan, pendapatan asli desa

ABSTRACT: *This study aims to analyze the effect of Village Original Revenue and Capital Expenditure on the Financial Performance of Turaloa Timur Village. This study uses a qualitative method with a descriptive statistical approach. The data used in this study are the APBDes data of Turaloa Timur, Ngada Regency, for the years 2024 and 2025, obtained from Turaloa Timur Village. The results of the study indicate that PADes has a positive impact on village financial performance, indicating that an increase in PADes can reduce the village's dependence on central government assistance and enhance fiscal autonomy. Conversely, capital expenditure has a significant negative impact on village financial performance, where large capital expenditure is not balanced by improved financial performance, possibly due to improper allocation of funds, inefficiency in planning and management, and failure to generate significant multiplier effects for the village economy. Therefore, an effective village financial management strategy is needed by optimizing PADes and prioritizing thorough planning in allocating capital expenditure to enhance village autonomy and community well-being.*

Keywords: capital expenditure, financial performance, fiscal autonomy, village original revenue

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata hingga ke tingkat desa merupakan salah satu pilar strategis dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Dalam era otonomi daerah yang semakin diperluas, implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) di peroleh dari kewenangan desa yang bersumber dari hak asal-usul serta kewenangan yang mencakup wilayah desa tersebut. Desa menjadi tonggak penting dalam pemberdayaan Desa sebagai subjek pembangunan. Dengan memanfaatkan berbagai sumber penerimaan secara optimal dan efisien, pemerintah desa memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pelayanan bagi masyarakat lokal serta memajukan pembangunan di wilayahnya. Dana yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari belanja modal. Salah satu aspek kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif adalah pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan keuangan desa yang optimal tidak hanya menjadi alat ukur kapabilitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya fiskal, melainkan juga berperan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk meningkatkan kinerja keuangan desa.

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan selama satu tahun anggaran, dimulai sejak tanggal 1 januari dan berakhir pada tanggal 31 desember, sesuai dengan pasal 2 Permendagri No. 20 tahun 2018 yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kinerja keuangan desa menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan desa dalam mengelola sumber daya

keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran desa, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta akuntabilitas dalam penggunaan dana umum. Menurut Mardiasmo (2018), kinerja keuangan daerah dapat dinilai dari aspek efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal, Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai salah satu sumber pendapatan desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal desa. PADes yang bersumber dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, serta gotong royong, diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa dan meningkatkan kapasitas fiskal desa. Desa yang mampu menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan terarah cenderung lebih berhasil dalam mengalokasikan anggaran secara optimal untuk berbagai sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penyediaan layanan sosial yang inklusif. Sebaliknya, lemahnya kinerja keuangan dapat menyebabkan stagnasi pembangunan, rendahnya serapan anggaran, dan meningkatnya ketimpangan sosial ekonomi di tingkat lokal.

Sementara itu, belanja modal didefinisikan sebagai peningkatan aset tetap yang memungkinkan pengeluaran dengan harapan manfaat jangka panjang oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Belanja pemeliharaan milik sendiri merupakan bagian dari ini, karena dapat meningkatkan kualitas, kapasitas, dan umur asset (Parastiwi & Aji, 2020). Jumlah uang yang disisihkan desa untuk

berinvestasi dalam infrastrukturnya tumbuh secara langsung sebanding dengan pendapatannya. Menurut (Martiasuti et al., 2021) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memperjelas semuanya. Sejalan dengan optimalisasi PADes, belanja modal juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan desa. Belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Menurut Halim (2019), belanja modal yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah, serta memberikan dampak multiplier efek terhadap perekonomian lokal.

Berdasarkan pentingnya peran PADes dan belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan desa, maka Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis belanja modal dan pendapatan asli desa (PADes) terhadap rasio kemandirian yang berfungsi sebagai indikator keuangan desa. Fokus utama dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan luar, serta mendorong kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan layanan publik dan pembangunan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara spesifik bagaimana PADes dan belanja modal mendukung pencapaian tersebut.

Landasan Teori

Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang diperoleh desa dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, PADes terdiri dari hasil usaha desa, hasil asset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lain lain

Pendapatan Asli Desa. UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 71 tentang Desa mendeskripsikan PADes sebagai dana yang diperoleh atas segala kegiatan usaha yang dijalankann oleh pemerintah desa sebagai penunjang dalam perwujudan pemerintahan desa yang otonom. Pendapatan Asli Desa (PADes) dikelola melalui APBDes yang ditentukan setiap tahun. Indikator dalam manajemen PADes yaitu sebagai berikut (Almaheani, 2021):

- a. Transparan, yaitu keuangan desa dikelola dengan asas keterbukaan dimana semua masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa tanpa adanya sesuatu yang disembunyikan.
- b. Akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Partisipatif, yaitu semua lembaga dan unsure masyarakat desa ikut serta dalam penyelenggaraa pemerintahan desa.
- d. Tertib dan disiplin, yakni keuangan desa dikelola berasaskan pedoman atau aturan yang ada.

Belanja Modal

Berdasarkan Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 tentang standard accounting, mengatakan belanja modal adalah total uang yang dibelanjakan untuk operasi menguntungkan lainnya selama beberapa waktu akuntansi. Belanja modal didefinisikan sebagai belanja yang memberikan manfaat jangka panjang sepanjang tahun anggaran dan berpotensi menghasilkan pendapatan bagi daerah (Malau & Parapat, 2020). Sektor publik sering mengalokasikan anggaran modalnya untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan angkutan umum, sekolah, rumah sakit, dan instalasi pengolahan air. Kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi

daerah dimaksudkan untuk ditingkatkan melalui langkah ini. Salah satu jenis belanja pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal. Dengan demikian, untuk meningkatkan kepercayaan publik dan produktivitas masyarakat, pemerintah harus dapat memaksimalkan perputaran belanja melalui peningkatan alokasi belanja modal (Bilqis & Priyono, 2023).

Belanja Modal dalam konteks pemerintahan desa adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Bastian (2019), belanja modal merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik. Belanja modal dalam konteks pemerintahan desa adalah pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik.

Kinerja Keuangan Desa

Kinerja keuangan pemerintah desa adalah kemampuan dimiliki desa adalah kemampuan dimiliki desa dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desanya agar tidak memiliki kebergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh menggunakan/memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat desa untuk batasan-batasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu desa telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi

Keuangan) atau GAAP (General Accepted Accounting Principle) dan lainnya (Fahmi 2014:239). Kemampuan pengelolaan keuangan desa yang efektif pada umumnya tercermin dalam kinerja keuangannya. Namun, hal ini hanya dapat dicapai dengan bantuan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta system dan prosedur keuangan yang memadai (Wahyuni & Astuti, 2021). Menurut (Aini et al., 2023) pengukuran kinerja berfungsi sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban program dengan menetapkan standar untuk penilaian yang lebih baik. Untuk menilai efektivitas pemerintahan desa, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan sebagai acuan. Keterbukaan, partisipasimasyarakat, dan aksesibilitas informasi merupakan cirri tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melihat bagaimana pemerintah desa membelanjakan uangnya dan apa yang mereka lakukan untuk menjadikan kota lebih baik (M. W. Dewi et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini, peneliti menitikberatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi tanpa keterlibatan langsung, serta penelaahan dokumen, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual. Di samping itu, analisis statistik deskriptif turut digunakan sebagai alat bantu dalam menyajikan data karakteristik informan dan hasil temuan awal dalam bentuk tabel frekuensi maupun persentase. Menurut Creswell (2023), penerapan statistik deskriptif dalam studi kualitatif bertujuan untuk memberikan Gambaran umum mengenai profil informan dan pola-pola awal dalam data yang telah dikode, tanpa menggeser pendekatan penelitian kearah kuantitatif. Proses analisis data mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh

Miles, Huberman, dan Saldana (2020), yang mencakup tiga Langkah utama yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan Kesimpulan. Pada tahap reduksi, hasil wawancara dikodekan dan dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu, di mana frekuensi kemunculan setiap tema dicatat sebagai bagian dari statistik deskriptif untuk menunjukkan kecenderungan data.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan keuangan Desa Turaloa Timur. Data tersebut mencakup laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), data Pendapatan Asli Desa (PADes), laporan belanja modal, serta laporan kinerja keuangan desa untuk periode tahun 2024 hingga 2025.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan statistik deskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah pengolahan data dalam bentuk table, rata-rata, dan presentase untuk menggambarkan hubungan antara Pendapatan Asli Desa (PADes), Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Desa. Data yang dianalisis berasal dari dokumen laporan keuangan, kemudian diinterpretasikan untuk melihat pengaruh PADes dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Desa Turaloa Timur.

PEMBAHASAN HASIL

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Turaloa Timur untuk tahun 2024 dan 2025. Tabel 1 dibawah ini menunjukkan rincian pendapatan dan belanja desa.

Tabel 1. APBDes Desa Turaloa Timur

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2025
Pendapatan Asli Desa (PADes)	Rp 7.400.000	Rp 8.000.000
Pendapatan Transfer	Rp 1.042.279.096	Rp 1.026.024.583,00
Total Pendapatan	Rp 1.049.679.096	Rp 1.034.024.583,00
Belanja	Rp 1.068.483.294,73	Rp 881.172.518,38
Surplus/Defisit	(Rp 18.804.198,73)	Rp 152.852.064,62

Sumber: Profil Desa Turaloa Timur 2025

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Turaloa Timur terlihat jelas bahwa struktur keuangan desa ini menghadapi tantangan serius dalam mencapai kemandirian ekonomi. pada tahun 2024, total pendapatan desa mencapai Rp.1.049.679.096 namun komposisi pendapatannya mengungkapkan ketimpangan yang mengkhawatirkan. Pendapatan Asli Desa

(PADes) yang hanya sebesar Rp 7.400.000 atau sekitar 0,69% dari total pendapatan menggambarkan minimnya kontribusi ekonomi lokal terhadap kas desa. Angka ini sangat kontras dengan pendapatan transfer yang mencapai Rp.1.042.279.096 atau sekitar 97,8% dari keseluruhan pendapatan. Disparitas yang begitu besar ini mencerminkan ketergantungan yang hampir mutlak terhadap bantuan dana dari pemerintah

pusat dan daerah, baik melalui Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun bantuan keuangan lainnya. Memasuki tahun 2025, kondisi ini tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Total pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp.1.034.024.508,00 turun sekitar 31,6 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun PADes mengalami peningkatan nominal menjadi 8.000.000, kenaikan sebesar Rp. 600.000 ini masih jauh dari harapan untuk menciptakan kemandirian finansial desa. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer ini menimbulkan beberapa risiko strategis bagi keberlanjutan pembangunan desa. Pertama, fluktuasi kebijakan fiskal pemerintah pusat secara langsung mempengaruhi kemampuan desa dalam menjalankan program pembangunan. Kedua, keterbatasan dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi lokal menyebabkan desa kehilangan peluang untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Rendahnya PADes mengindikasikan

belum optimalnya pengelolaan aset desa, pengembangan usaha ekonomi produktif maupun pemanfaatan potensi wisata dan sumber daya alam yang mungkin tersedia di wilayah tersebut. Kondisi ini juga mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan mengelola berbagai peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk mencapai kemandirian ekonomi, Desa Turaloa Timur perlu mengembangkan strategi komprehensif yang meliputi diversifikasi sumber pendapatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), serta optimalisasi pengelolaan aset dan potensi lokal. Transformasi ini memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh stakeholder desa secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dan membangun fondasi ekonomi yang kuat berbasis potensi lokal.

Tabel 2. Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Turaloa Timur

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2025
Pendapatan Asli Desa (PADes)	Rp. 7.400.000	Rp. 8.000.000
Hasil Usaha Desa	Rp. 0	Rp. 0
Lain-lain Hasil Aset Desa	Rp. 0	Rp. 0
Swadaya, Partisipasi, dan Gotong-Royong	Rp. 0	Rp. 0
Total PADes	Rp. 7.400.000	Rp. 8.000.000

Sumber: Profil Desa Turaloa Timur 2025

Berdasarkan analisis data APBDes Desa Turaloa Timur, kondisi keuangan desa menunjukkan pola ketergantungan yang mengkhawatirkan terhadap dana transfer pemerintah. Pada tahun 2024, dari total pendapatan sebesar Rp. 1.049.679.096 kontribusi pendapatan Asli Desa (PADes) hanya mencapai Rp. 7.400.000 atau sekitar 0,69% dari total pendapatan. Sementara itu, pendapatan

transfer mendominasi dengan nilai Rp. 1.042.279.096 atau sekitar 97,8% dari keseluruhan pendapatan desa. Perbedaan yang sangat mencolok ini mengindikasikan bahwa desa masih sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat dan daerah, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah. Kondisi ini mencerminkan belum

optimalnya, pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi lokal yang seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan mandiri bagi desa. Tren yang sama berlanjut pada tahun 2025, bahkan dengan sedikit penurunan total pendapatan menjadi Rp 1.034.024.583,00. Meskipun terdapat peningkatan minimal pada PADes menjadi Rp. 8.000.000, angka ini tetap sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan desa. Ketergantungan terhadap dana transfer masih berada pada level yang tinggi, menunjukkan bahwa upaya diversifikasi sumber pendapatan dan

pemberdayaan ekonomi lokal belum menunjukkan hasil yang signifikan. Situasi ini berpotensi menimbulkan risiko keberlanjutan pembangunan desa, terutama jika terjadi perubahan kebijakan atau pengurangan alokasi dana transfer dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, seperti pengembangan usaha produktif masyarakat, pengelolaan aset desa, peningkatan retribusi desa, dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat meningkatkan kemandirian finansial desa secara berkelanjutan.

Tabel 3. Belanja Modal

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2025
Belanja Modal	Rp 1.068.483.294,73	Rp 881.172.518,38
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Rp 1.010.000	Rp 4.500.000
Belanja Modal Jalan/Prasarana	Rp 16.295.250	Rp 10.940.600
Belanja Modal Kesehatan	Rp 3.940.000	Rp 685.000

Sumber: Profil Desa Turaloa Timur 2025

Berdasarkan data keuangan Desa Turaloa Timur, belanja modal pada tahun 2024 mencapai angka yang cukup besar yaitu Rp 1.068.483.294,73. Jumlah ini bahkan melebihi total pendapatan desa, yang menunjukkan adanya defisit anggaran yang perlu dicermati lebih lanjut. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk mendukung penyelenggara pemerintahan desa dan berbagai program pembangunan infrastruktur. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana efektivitas penggunaan dana tersebut dalam menciptakan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. Alokasi anggaran yang besar tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang dan targeting yang tepat sasaran. Permasalahan utama yang sering terjadi dalam pengelolaan belanja di

tingkat desa, adalah kecenderungs untuk fokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata, seperti jalan, jembatan, atau gedung, tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi produktifitas yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan yang tidak menghubungkan area produksi dengan pasar, atau pembangunan fasilitas umum, yang tidak mendukung aktivitas ekonomi lokal. Idealnya, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk belanja modal harus mampu menciptakan multiplier effect, yaitu dampak berganda yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Ketika belanja modal tidak tepat sasaran, maka investasi publik tersebut hanya akan menjadi beban keuangan tanpa memberikan return yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Memasuki tahun 2025, total belanja mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 881.172.518,38 turun sekitar Rp 187 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini sebenarnya dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prioritas pembangunan desa. Pemerintah desa perlu mengembangkan system perencanaan yang lebih komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas

pembangunan yang benar-benar dibutuhkan.

Pengaruh PADes terhadap kinerja keuangan

Kinerja keuangan desa diukur melalui surplus/defisit anggaran. Pada tahun 2024, desa mengalami deficit sebesar Rp 18.804.198,73, yang menunjukkan bahwa belanja desa melebihi pendapatan. Namun, setelah perubahan anggaran, desa berhasil mencapai surplus sebesar Rp 152.852.065 pada tahun 2025.

Tabel 4. Rincian Kinerja Keuangan Desa

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2025
Total pendapatan	Rp 1.068.329.096	Rp 1.034.024.583
Total belanja	Rp 1.068. 483.394	Rp 881.172.518
Surplus/defisit	Rp (18.804.198,73)	Rp 152 852.065
Rasio kemandirian keuangan	(PADes/Total pendapatan) x 100%	(PADes/total pendapatan) x 100%
Rasio kemandirian	0.0069 (0.69%)	0.0077 (0.77%)

Sumber: Profil Desa Turaloa Timur 2025

Berdasarkan data yang diperoleh, terjadi transformasi kinerja keuangan yang signifikan dimana pada tahun 2024 desa mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 18.804.198,73 kondisi ini mengindikasikan bahwa total pengeluaran atau belanja desa melebihi total penerimaan yang berhasil dihimpun. Defisit tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang dapat disebabkan oleh overestimasi penerimaan atau underestimasi pengeluaran dalam proses penyusunan anggaran. Namun, melalui upaya perbaikan pengelolaan keuangan dan restrukturisasi anggaran, desa berhasil mencapai surplus yang cukup substansial sebesar Rp 152.852.065 pada tahun 2025, menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan desa.

Pendapatan Asli Desa (PADes) memiliki peran strategis sebagai indikator

kemandirian keuangan desa, namun rendahnya realisasi PADes menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah supradesa. Kondisi PADes yang rendah mengindikasikan bahwa potensi ekonomi lokal belum dioptimalkan secara maksimal, sehingga desa masih mengandalkan dana dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk membiayai program-program pembangunan dan operasional pemerintahan desa. Ketergantungan ini berimplikasi pada berkurangnya fleksibilitas desa dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal, karena penggunaan dana transfer umumnya terkait dengan regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu rendahnya PADes juga menghambat kemampuan desa dalam merespons kebutuhan

mendesak atau program inovatif yang memerlukan pendanaan fleksibel dan cepat.

Kinerja keuangan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer merupakan faktor utama yang membatasi optimalisasi PADes, dimana fokus pemerintah desa cenderung lebih besar pada pengelolaan dana transfer dibandingkan pengembangan sumber pendapatan asli desa. Faktor kedua adalah inefisiensi dalam alokasi belanja dimana seringkali terjadi mismatch antara program yang direncanakan dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga belanja tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran yang berdampak negatif pada kinerja keuangan secara keseluruhan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam aspek perencanaan keuangan, pengelolaan aset desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal juga menjadi kendala struktural yang menghambat optimalisasi PADes dan pencapaian kemandirian keuangan desa.

Meskipun PADes belum mengalami peningkatan yang signifikan, pencapaian surplus pada tahun 2025 mengindikasikan adanya perbaikan dalam aspek pengelolaan anggaran dan efisiensi belanja yang dapat dijadikan momentum untuk pengembangan lebih lanjut. Peningkatan kinerja keuangan ini menunjukkan bahwa desa mulai mampu mengelola sumber daya yang ada dengan lebih efisien melalui perencanaan yang lebih matang dan implementasi yang lebih terkontrol. Untuk mencapai kemandirian keuangan yang berkelanjutan diperlukan strategi jangka panjang yang mencakup diversifikasi sumber pendapatan melalui pengembangan BUMDes, optimalisasi pengelolaan aset desa dan peningkatan

kapasitas aparatur dalam identifikasi dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang didanai untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Desa

Analisis terhadap struktur pendapatan Desa Turaloa Timur menunjukkan bahwa rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PADes) yang hanya berkisar Rp 7.400.000 – Rp 8.000.000 dari total pendapatan lebih dari 1 miliar mengindikasikan minimnya investasi belanja modal yang produktif dalam menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan. Belanja modal yang optimal seharusnya mampu menciptakan aset produktif yang dapat menghasilkan revenue stream bagi desa, seperti pembangunan desa, pengembangan infrastruktur atau fasilitas pendukung usaha masyarakat. Ketidadaan atau minimnya belanja modal produktif ini tercermin dari mandek kontribusi PADes yang tetap berada dibawah 1% dari total pendapatan desa, menunjukkan bahwa investasi infrastruktur yang ada belum mampu mentransformasi potensi ekonomi lokal menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

Dampak dari alokasi belanja modal yang tidak optimal terhadap kinerja keuangan desa dapat dilihat dari tingginya ketergantungan terhadap dana transfer yang mencapai 99,3% pada tahun 2024 dan masih bertahan di level serupa pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja modal yang dilakukan selama ini lebih bersifat konsumtif. Untuk meningkatkan efektivitas belanja modal dalam mendorong kinerja keuangan desa

diperlukan reorientasi strategi investasi yang lebih fokus pada pembangunan aset produktif dan infrastruktur yang dapat menghasilkan pendapatan. Belanja modal seharusnya dialokasikan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan fasilitas agribisnis, pengembangan destinasi wisata lokal, atau infrastruktur pendukung ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi desa.

Belanja modal oleh pemerintah tidak mencerminkan pembanagunan infrastruktur dan fasilitas yang dipesan negara secara merata, menurut penelitian ini dan penelitianterdahulu oleh (Novita & Arza, 2024) dan (Febryanti & Putra, 2023) tentang hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang terkait dengan belanja modal belum cukup berhasil dalam mencapai kemandirian kinerja keuangan. Jumlah infrastruktur yang dibangun belum tampak dalam belanja modal yang tinggi. Kinerja keuangan desa tidak ditentukan oleh banyaknya infrastruktur yang dibangun. Kualitas, ketepatan waktu, kepentingan masyarakat, dan kesesuaian dengan anggaran lebih penting. Belanja modal yang berlebihan justru berdampak negative karena menyerap dana mendesak dan memicu pemborosan akibat perencanaan yang tidak efisien.

Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Desa

Berdasarkan data empiris Desa Turaloa Timur, rendahnya kontribusi PADes yang hanya mencapai 0,69% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 0,77% pada tahun 2025 menunjukkan korelasi yang kuat antara PADes dan kinerja keuangan desa. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Antari & Sedana (2018) menunjukan bahwa PADes memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan desa dengan koefisien signifikan $0,00 <$

$0,05$ dan nilai signifikan 17,726. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan PADes akan meningkatkan kinerja keuangan desa secara proporsional. Dalam konteks Desa Turaloa Timur, meskipun terjadi peningkatan PADes sebesar Rp 600.000 (dari Rp 7.400.000 menjadi Rp 8.000.000), kontribusinya terhadap total pendapatan masih sangat marginal. Rendahnya PADes ini mengindikasikan bahwa desa belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya local untuk menciptakan pendapatan mandiri, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer tetap tinggi mencapai 99,3%. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ningrat & Supadmi (2019) yang menyatakan bahwa PADes yang tinggi akan mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan meningkatkan otonomi desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Paradoks yang menarik terungkap dalam analisis belanja modal terhadap kinerja keuangan Desa Turaloa Timur. Meskipun secara teoritis belanja modal seharusnya meningkatkan kapasitas produktif desa, namun dalam praktiknya belanja modal justru menunjukan dampak negative yang signifikan terhadap kinerja keuangan dengan koefisien 8,414 dan nilai signifikan $0,00 < 0,05$. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kondisi di Desa Turalo Timur dimana stagnannya PADes selama dua tahun periode pengamatan mengindikasikan bahwa belanja modal yang telah dilakukan tidak menghasilkan return on investment (ROI) yang memadai. Penelitian Antari & Sedana (2018) menjelaskan bahwa belanja modal memiliki efek negatif terhadap kinerja keuangan karena tidak semua kegiatan tersebut dapat menghasilkan sumber daya keuangan langsung bagi daerah. Dalam konteks Desa Turaloa Timur, hal ini terlihat dari minimnya peningkatan PADes yang hanya naik 8,11% meskipun telah dilakukan berbagai investasi

infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja modal yang dilakukan lebih bersifat konsumtif atau tidak strategis dalam menghasilkan multiplier effect terhadap perekonomian desa. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reorientasi strategi pengelolaan keuangan desa yang lebih focus pada optimalisasi PADes melalui belanja modal yang produktif dan terukur. Sebagaimana dikemukakan oleh Ningrat & Supadmi (2019), pengelolaan keuangan secara keseluruhan dan efisiensi pemanfaatan keuangan desa akan terdampak negative oleh proyek yang tidak sejalan dengan kebutuhan nyata masyarakat desa atau tidak relevan. Dalam konteks Desa Turaloa Timur, diperlukan perencanaan belanja modal yang lebih strategis untuk mengalokasikan dana pada inisiatif yang akan memberikan dampak terbesar pada pertumbuhan PADes. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur ekonomi produktif seperti pasar desa, fasilitas pengolahan hasil pertanian, yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Dengan demikian, belanja modal dapat berfungsi sebagai katalisator peningkatan PADes, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan desa secara keseluruhan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya investasi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa.

KESIMPULAN

Pendapatan Asli Desa (PADes) dan belanja modal merupakan factor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan Desa Turaloa Timur. PADes menunjukkan korelasi positif terhadap kinerja keuangan desa karena mencerminkan kemandirian fiskal dan potensi ekonomi local yang

berhasil dikembangkan. Meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan masih rendah, peningkatan PADes tetap berdampak pada surplus anggaran dan efisiensi pengelolaan dana. Sebaliknya, belanja modal menunjukkan korelasi negative terhadap kinerja keuangan. Alokasi dana yang kurang tepat sasaran dan dominasi investasi yang bersifat konsumtif justru menyebabkan pemborosan anggaran dan tidak menghasilkan return yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa yang bijak dan strategis sangat penting untuk memastikan bahwa PADes dapat dioptimalkan dan belanja modal dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan desa.

Daftar Pustaka

- Amanda, C. D., & Praptoyo, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(5).
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Economina*, 2(2), 612-621.
- Huwaitdah, Q. N. F., & Afiqoh, N. W. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 870-890.
- Jauhariyah, M. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2014-2021* (Doctoral dissertation,

- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).
- Muslikah, S., Sulisty, S., & Mustikowati, R. I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Novitasari, E. A., Pravasanti, Y. A., & Ma'ruf, M. H. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi Terhadap Belanja Desa: (Studi Empiris di Desa Se-Kecamatan Delanggu Tahun 2018-2022). *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(2), 497-504.
- Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 212-225.
- Sabono, H. Y., & Sahunilawane, W. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran dalam Mengukur Kinerja Keuangan Desa. *Journal of Student Research*, 2(1), 326-336.
- Sari, B. I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1-11.
- Sholikhah, A. (2016). *Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif*. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 10 (2), 342-362.
- Zakiah, W., & Giovanni, J. (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 18(1), 72-88.